

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks ekonomi makro, fungsi government expenditure (pengeluaran pemerintah) menurut (Azwar, 2016) adalah salah satu variabel pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) selain dari permintaan sektor rumah tangga untuk barang-barang konsumsi (C), permintaan sektor bisnis investasi (I), pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa (G) dan pengeluaran sektor luar negeri untuk ekspor dan impor (X-M). Sebagai salah satu negara yang aktif mendorong pembangunan nasional, Indonesia memahami nilai pembangunan, tingkat kesejahteraan sosial, dan perlunya mengejar ketertinggalan dengan negara lain dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tanda keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan faktor-faktor produksi, yang akan sangat mempercepat pembangunan ekonomi. Dalam penelitian (Muafiah, 2019) menurutnya Pendapatan penduduk akan meningkat sebagai akibat dari ekspansi ekonomi yang stabil, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan manusia.

Dalam analisis ini variabel yang digunakan adalah pengeluaran sektor pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan, dan pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur. Teori Keynes beranggapan bahwa perluasan belanja pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Mengenai hubungan antara belanja publik dengan pertumbuhan ekonomi, dalam (Wahyudi, 2020) menjelaskan keynes berpandangan bahwa pengeluaran pemerintah yang relatif tinggi menyebabkan peningkatan permintaan agregat, dan pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari ketiga variabel yang dipilih tentunya memiliki pengaruh berbeda-beda terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan ini maka dilakukan Analisa untuk mengetahui pengaruh yang diberikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu negara dan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan

bangsa Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan kualitas hidup negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan utama bagi negara-negara berkembang dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini agar sebagai akibat dari peningkatan produksi produk dan jasa yang sangat terkait dengan pertumbuhan ekonomi kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat.

Pembangunan harus dipandang sebagai proses multidimensi yang mencakup berbagai perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional guna mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik, baik material maupun spiritual. Pendidikan, Kesehatan, dan pembangunan Infrastruktur adalah tujuan utama pembangunan; ketiganya saling signifikan terkoneksi dalam system pertumbuhan ekonomi. Kesehatan adalah dasar dari kesejahteraan, dan pendidikan diperlukan untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Sedangkan Pembangunan Infrastruktur adalah sebagai fasilitas dalam memenuhi kesejahteraan. Ketiganya sangat penting untuk membentuk kualitas manusia yang lebih umum yang membentuk dasar dari apa arti pembangunan. Pendidikan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan negara berkembang untuk pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan, serta kapasitasnya untuk menyerap teknologi baru. Selain itu, peningkatan produksi bergantung pada kesehatan dan Infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, sebagai input untuk fungsi produksi agregat, ketiga variabel pendukung ini juga dapat dianggap sebagai elemen penting dari pertumbuhan dan perkembangan.

Sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa, karena manusia adalah faktor produksi yang bersifat aktif mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber-sumber daya alam, membangun organisasi-organisasi sosial, ekonomi, politik dan melaksanakan pembangunan nasional. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas maka Pendidikan, Kesehatan dan pembangunan Infrastruktur merupakan suatu hal yang penting dan untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus dilakukan. Karena dengan sumber daya manusia mutlak harus dilakukan. Menurut (Notoatmodjo, 2003) dengan sumber daya

manusia yang berkualitas dapat 4 memberikan multiplier effect terhadap pembangunan suatu negara khususnya pembangunan bidang ekonomi. Secara umum tingkat Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Infrastruktur dapat mewakili kualitas tenaga kerja dengan pendidikan, seseorang akan bertambah keterampilannya, dengan kesehatan seseorang akan lebih kuat dan jernih pemikirannya dalam bekerja, sedangkan pembangunan infrastruktur adalah sebagai penunjang fasilitas prasarana output kegiatan produksi.

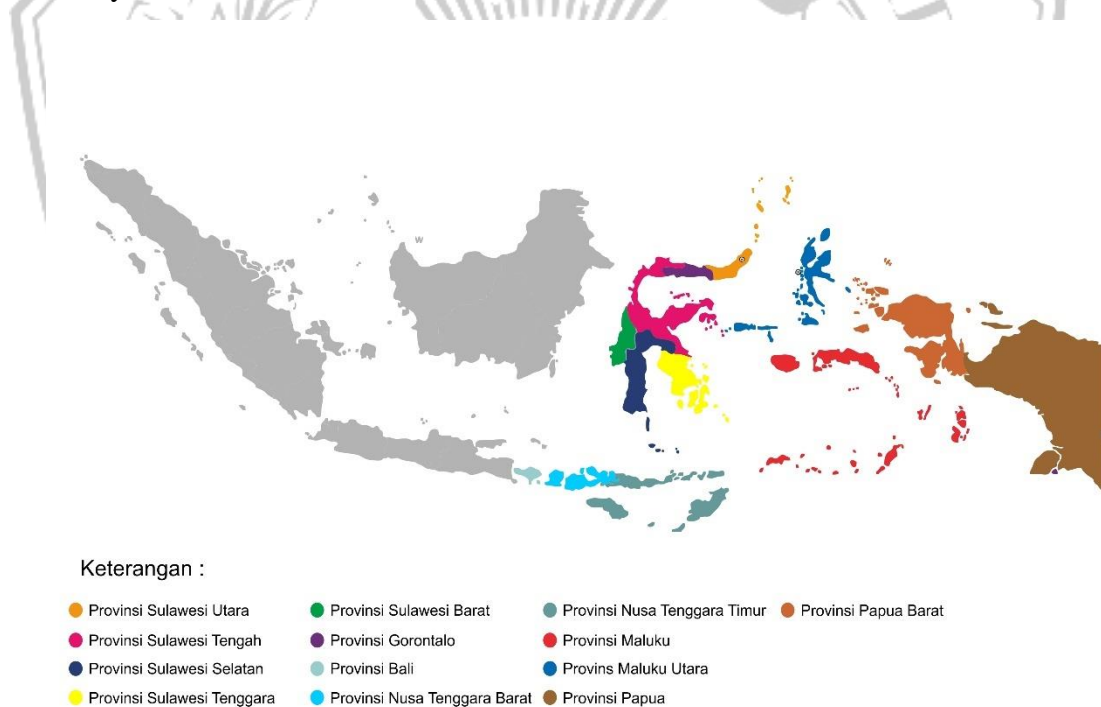
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting kinerja ekonomi suatu negara. Dalam hal ini, banyak penelitian dan karya penelitian telah difokuskan pada faktor-faktor dan kebijakan yang dapat membuat potensi sumber pertumbuhan yang efektif. Pada penelitian (Milova, 2011) menjelaskan sebuah studi OECD pada faktor-faktor pertumbuhan ekonomi menekankan bahwa kebijakan tepat sasaran merupakan instrumen penting bagi iklim usaha dan investasi publik, yang signifikan berkontribusi pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah atas Pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur pada dasarnya merupakan suatu investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, efek pembangunan pada ketiga sektor tersebut tidak dapat berdampak langsung melainkan membutuhkan beberapa periode untuk dapat merasakan dampaknya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bastias Dwi, 2010) terdapat time lag ketika pemerintah mengeluarkan anggaran pembangunan dan belanja negara untuk ketiga sektor tersebut dengan dampak kebijakan tersebut, maka dibutuhkan suatu penelitian yang menggunakan runtun waktu akan membantu melihat pengaruh pengeluaran pemerintah pada ketiga sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut (Dumairy, 1999), peran pemerintah bersifat alokatif, distributif, stabil, dan dinamis; harus mampu menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pemerintah akan melakukan investasi pada belanja pembangunan. Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan disebut sebagai pengeluaran pembangunan. Meningkatkan kesejahteraan manusia merupakan salah satu tujuan pembangunan. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, maka kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Standar sumber daya manusia akan

meningkat jika tuntutan dasar terpenuhi. Kemajuan teknis yang lebih baru akan mendapat manfaat dari kontribusi sumber daya berkualitas tinggi, meningkatkan efektivitas produksi.

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan berupa anggaran yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterkan masyarakatnya dan menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan maju. Pengeluaran pemerintah terhadap sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Infrastruktur merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang memacu kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam kasus ini wilayah Indonesia bagian timur adalah sasaran tepat sebagai lokasi penelitian yang dimana masih banyak orang yang beranggapan bahwa pada wilayah Indonesia bagian timur masih mengalami kesenjangan dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya.



Gambar 1. 1 Peta Wilayah Indonesia Bagian Timur

Indonesia Timur, atau disebut juga Kawasan Timur Indonesia (KTI), adalah sebuah kawasan di bagian timur Indonesia yang meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Bali, Kepulauan Maluku, dan Papua (Kawasan Timur Indonesia (KTI), 2021). Wilayah Indonesia Timur disini terbagi atas 13

provinsi diantaranya termasuk Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Wilayah yang ada di bagian timur Indonesia ini selalu mengalami kesenjangan dibanding dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia Barat (Jawa, Sumatera, Kalimantan). Hal ini dibuktikan dengan fasilitas-fasilitas baik Pendidikan, Kesehatan, maupun sarana prasarana yang tersedia. Fenomena demikianlah yang seharusnya menjadikan pemerintah harus melakukan skala prioritas atas ketimpangan yang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan tabel pertumbuhan ekonomi dibawah ini:

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2011 - 2020

PROVINSI	LAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Menurut Provinsi (Persen)									
	TAHUN									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACEH	3,28	3,85	2,61	1,55	-0,73	3,29	4,18	4,61	4,14	-0,37
SUMATERA UTARA	6,66	6,45	6,07	5,23	5,1	5,18	5,12	5,18	5,22	-1,07
SUMATERA BARAT	6,34	6,31	6,08	5,88	5,53	5,27	5,3	5,14	5,01	-1,62
RIAU	5,57	3,76	2,48	2,71	0,22	2,18	2,66	2,35	2,81	-1,13
JAMBI	7,86	7,03	6,84	7,36	4,21	4,37	4,6	4,69	4,35	-0,44
SUMATERA SELATAN	6,36	6,83	5,31	4,79	4,42	5,04	5,51	6,01	5,69	-0,11
BENGKULU	6,85	6,83	6,07	5,48	5,13	5,28	4,98	4,97	4,94	-0,02
LAMPUNG	6,56	6,44	5,77	5,08	5,13	5,14	5,16	5,23	5,26	-1,67
KEP. BANGKA BELITUNG	6,9	5,5	5,2	4,67	4,08	4,1	4,47	4,45	3,32	-2,3
KEP. RIAU	6,96	7,63	7,21	6,6	6,02	4,98	1,98	4,47	4,83	-3,8
DKI JAKARTA	6,73	6,53	6,07	5,91	5,91	5,87	6,2	6,11	5,82	-2,39
JAWA BARAT	6,5	6,5	6,33	5,09	5,05	5,66	5,33	5,65	5,02	-2,52
JAWA TENGAH	5,3	5,34	5,11	5,27	5,47	5,25	5,26	5,3	5,36	-2,65
DI YOGYAKARTA	5,21	5,37	5,47	5,17	4,95	5,05	5,26	6,2	6,59	-2,68
JAWA TIMUR	6,44	6,64	6,08	5,86	5,44	5,57	5,46	5,47	5,53	-2,33
BANTEN	7,03	6,83	6,67	5,51	5,45	5,28	5,75	5,77	5,26	-3,39
BALI	6,66	6,96	6,69	6,73	6,03	6,33	5,56	6,31	5,6	-9,33
NUSA TENGGARA BARAT	-3,91	-1,54	5,16	5,17	21,76	5,81	0,09	-4,5	3,9	-0,62
NUSA TENGGARA TIMUR	5,67	5,46	5,41	5,05	4,92	5,12	5,11	5,11	5,25	-0,84
KALIMANTAN BARAT	5,5	5,91	6,05	5,03	4,88	5,2	5,17	5,07	5,09	-1,82
KALIMANTAN TENGAH	7,01	6,87	7,37	6,21	7,01	6,35	6,73	5,61	6,12	-1,41
KALIMANTAN SELATAN	6,97	5,97	5,33	4,84	3,82	4,4	5,28	5,08	4,09	-1,82
KALIMANTAN TIMUR	6,47	5,48	2,76	1,71	-1,2	-0,38	3,13	2,64	4,7	-2,87
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	8,18	3,4	3,55	6,8	5,36	6,89	-1,09
SULAWESI UTARA	6,17	6,86	6,38	6,31	6,12	6,16	6,31	6	5,65	-0,99
SULAWESI TENGAH	9,82	9,53	9,59	5,07	15,5	9,94	7,1	20,6	8,83	4,86
SULAWESI SELATAN	8,13	8,87	7,62	7,54	7,19	7,42	7,21	7,04	6,91	-0,71
SULAWESI TENGGARA	10,63	11,65	7,5	6,26	6,88	6,51	6,76	6,4	6,5	-0,65
GORONTALO	7,71	7,91	7,67	7,27	6,22	6,52	6,73	6,49	6,4	-0,02
SULAWESI BARAT	10,73	9,25	6,93	8,86	7,31	6,01	6,39	6,26	5,56	-2,4
MALUKU	6,34	7,16	5,24	6,64	5,48	5,73	5,82	5,91	5,41	-0,92
MALUKU UTARA	6,8	6,98	6,36	5,49	6,1	5,77	7,67	7,86	6,25	5,35
PAPUA BARAT	3,64	3,63	7,36	5,38	4,15	4,52	4,02	6,25	2,66	-0,76
PAPUA	-4,28	1,72	8,55	3,65	7,35	9,14	4,64	7,32	-15,74	2,39

Sumber : (BPS, 2020), Data Olahan Excel

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi yang disajikan menjelaskan bahwa prosentase pertumbuhan dari 13 provinsi yang tersaji mengalami kenaikan secara signifikan. Namun terlihat bahwa pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan yang disebabkan karena adanya pandemic covid-19.

Melihat potensi dari pertumbuhan ekonomi yang disajikan pada tabel diatas terlihat bahwa sebenarnya prosentase pertumbuhan yang dicapai sangat baik. Namun hal ini berbeda dengan keadaan sebenarnya yang terjadi terkait dengan bagaimana beberapa sektor seperti Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur belum sepenuhnya terpenuhi. Banyak sekali bagaimana kita lihat permasalahan-permasalahan yang sering muncul pada media sosial yang berhubungan dengan minimnya sumber daya manusia yang unggul karena tingkat Pendidikan yang masih buruk, tingkat Kesehatan yang minim karena fasilitas Kesehatan yang belum terpenuhi, minimnya fasilitas public dan berbagai macam permasalahan lainnya yang ada di wilayah bagian timur. Jika kita bandingkan dengan pertumbuhan yang ada di wilayah pulau jawa sebenarnya potensi prosentase lebih unggul dimiliki beberapa wilayah di Indonesia Timur seperti Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Bali, dan Provinsi Papua. Namun mengapa dengan tingginya prosentase pertumbuhan ekonomi yang dimiliki, beberapa provinsi masih memiliki standar Pendidikan, Kesehatan, dan Sarana Public yang belum maksimal.

Berdasarkan data yang dicantumkan di lampiran 8 data jumlah anggaran dan realisasi APBD dari beberapa provinsi yang ada di wilayah indonesia bagian timur yang disajikan menjelaskan bahwa sebenarnya anggaran yang disediakan sudah terserap dan terpakai secara menyeluruh, namun memang ada beberapa provinsi yang masih belum bisa memaksimalkan dana yang diberikan dengan baik.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan inilah yang mendorong saya sebagai penulis untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Indonesia Bagian Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Wilayah Indonesia Bagian Timur tahun 2011 – 2020 ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka ditentukan Batasan masalah guna menghindari penyimpangan dari pokok permasalahan agar penelitian dapat focus pada masalah yang telah ditentukan. Adapun beberapa Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan yang dibahas adalah tentang pengaruh pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Infrastruktur di wilayah Indonesia Bagian Timur.
2. Wilayah yang mencakup Indonesia Bagian Timur ada 13 Provinsi termasuk Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.
3. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

D. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan Masalah yang diambil maka terdapat tujuan dari Penelitian yang dilakukan seperti :

1. Untuk melihat besaran pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan, sektor Kesehatan, dan sektor Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Indonesia Bagian Timur pada tahun 2011 – 2020.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang meneliti sama seperti penelitian ini dengan memasukan variabel – variabel lain yang juga saling mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
2. Digunakan sebagai sumber informasi atas bahan pertimbangan pemerintah ataupun instansi dalam penentuan kebijakan.

